

KEBIJAKAN PENGUASA KOLONIAL BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN PESANTREN

*Moh. Slamet Untung**

Abstract: As a Javanese traditional educational institutions, *pesantren* can be said to be the oldest Islamic institution in *Nusantara* that grow and develop in the original Indonesian culture, which is believed by some researchers that it has adopted the model of previous education i.e. Hindu and Buddhist education. *Pesantren* in its development is influenced by the presence of a history of marginalization and isolation conducted by the Dutch. 350 years of Dutch colonialism led the development of intellectualism in *Nusantara* to be hampered. However, Islam in *Nusantara* remains strong and growing as shown in Islamic schools, which until now still survive and evolve with the more number and extensive Islamic education than other Muslim countries. Since the Dutch colonial era, schools have grown despite the Dutch colonial government never cared for the fate of the Islamic educational institutions. *Pesantren* still nurtured by Muslims themselves. *Pesantren* and Islamic educational institutions, such as *majlis ta'lim*, madrasah, *langgar / surau*, and others, are never acknowledged to be exist or even aided by the Dutch colonial government.

Kata Kunci : Kebijakan, Kolonial Belanda, Pesantren

PENDAHULUAN

Pesantren sepanjang perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya mampu hidup menyatu dengan masyarakatnya, bahkan *pesantren* menjadi rujukan masyarakat di bidang moral (Mastuhu, 1994: 5). Menurut Bruinessen (1999: 17) tradisi *pesantren* di Jawa merupakan salah satu *great tradition* di Indonesia dalam mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab klasik yang disebut *kitab kuning* (Mochtar, 2009: 37), yang ditulis berabad-

*. Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, e-mail: moh.slametuntung@yahoo.co.id

abad yang lalu. Bukti-bukti sejarah sosialisasi Islam di Nusantara memperlihatkan bahwa pesantren senantiasa memilih posisi sejarah yang tidak pernah netral. Sejak abad ke-16, pesantren telah menjadi dinamisor dalam setiap proses sejarah dan perjuangan bangsa (Ambary, 2001: 318). Bahkan Benda (1985: 33) sampai pada kesimpulan bahwa sejarah Islam Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial, dan politik di Indonesia.

Menurut Nurcholish Madjid (t.t.: 4), seandainya negeri kita tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren. Gambaran konkret sistem pendidikan pesantren dalam masyarakat Indonesia yang tidak dijajah dapat dibuat dengan menganalogikan sebuah pesantren di Indonesia (Tebuireng misalnya) dengan sebuah kelanjutan “pesantren” di Amerika (“pesantren” yang didirikan oleh pendeta Harvard di dekat Boston misalnya): Tebuireng menghasilkan apa yang bisa dilihat oleh rakyat Indonesia sekarang ini dan “pesantren”-nya pendeta Harvard itu telah tumbuh menjadi sebuah universitas yang paling “*prestigious*” di Amerika, dan hampir secara pasti menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern dan gagasan-gagasan mutakhir. Tetapi di Indonesia, peranan “Harvard” itu tidak dimainkan oleh Tebuireng dan lainnya, melainkan oleh suatu perguruan tinggi “umum” yang sedikit banyak merupakan kelanjutan lembaga pendidikan masa penjajahan, seperti Universitas Indonesia.

PESANTREN DI TENGAH PUSARAN KOLONIAL BELANDA

Pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang secara konsisten mengembangkan Islam dan menentang kolonialisme ketika bangsa ini dianeksasi oleh penjajah Belanda. Pada saat itu pesantren telah menanamkan bibit-bibit patriotisme dan fanatisme keagamaan yang sangat dibutuhkan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren menjadi “*training center*” dan “*cultural center*” Islam yang dilembagakan oleh masyarakat Islam sendiri yang secara *de facto* tidak dapat dinafikan oleh Belanda (Arifin, t.t.: 104). Ziemek (1986: 56) menunjukkan melalui penelitian disertasi berjudul *Pesantren dalam Perubahan Sosial* bahwa jumlah terbesar dari gerakan perlawanan dalam sejarah terhadap kekuasaan kolonial

Belanda berasal dari para kiai dengan pesantren-pesantrennya sebagai basis perjuangannya.

Perlawanan pesantren terhadap pemerintah kolonial Belanda dilakukan dalam rangka menjaga identitas religio-kulturalnya dari kedigdayaan penetrasi sistem pendidikan sekuler dan invasi militer Belanda. Perlawanan pesantren tersebut muncul secara tersembunyi dan terbuka. Menurut Mahmud Arif (2008: 177-178) dalam disertasi berjudul *Pendidikan Islam Transformatif*, perlawanan tersembunyi diwujudkan dalam bentuk sikap konservatif, defensif, dan isolasionis, sedangkan perlawanan terbuka dimanifestasikan dalam bentuk sikap nonkooperatif dan pengobaran semangat anti penjajah. Langkah ini dilatarbelakangi oleh semakin menguatnya penetrasi budaya Barat modern dan kebijakan diskriminatif Pemerintah Kolonial Belanda terhadap umat Islam.

Semangat perjuangan merebut kemerdekaan yang bergelora di Tanah Air telah memicu pesantren untuk terlibat langsung dalam perjuangan melawan kolonial Belanda secara terbuka. Keterlibatan ini pada akhirnya membentuk kesadaran “*protonasionalisme*” di kalangan pesantren yang berorientasi pada penciptaan dan penggalangan nasionalisme *vis a vis* penjajah sehingga mampu mengubah fungsi pesantren yang semula sebagai lembaga pendidikan menjadi *a center of anti-Dutch sentiment*.

Era 1930-an merupakan puncak penjajahan Belanda. Masa itu adalah masa pemberangusan pergerakan politik praktis. Kalangan nasionalis banyak beralih kepada isu pendidikan. Melalui pendidikan, kalangan nasionalis membangun imajinasi politik baru. Mereka merengkuh dan merangkul kembali pesantren. Padahal sebelumnya di masa-masa awal berdirinya Boedi Oetomo, pesantren sempat dicurigai dan dijadikan obyek pengawasan. Hal ini menurut Ahmad Baso (2012: 40) dapat dimaklumi mengingat banyak anggota Boedi Oetomo yang merupakan kader-kader Belanda. Goenawan Mangoenkoesoemo misalnya pernah mengusulkan dalam Kongres Boedi Oetomo di Yogyakarta pada 1930 untuk membuat program pengawasan pesantren. Usulan ini kemudian ditolak oleh peserta kongres berkat keberatan yang disampaikan Soetomo.

Soetomo termasuk salah seorang pendiri Boedi Oetomo hasil didikan sekolah modern Barat yang gigih mengangkat pesantren dan menghargainya sederajat bahkan melebihi kualitas sekolah modern. Baginya, pesantren bukan hanya khusus untuk masa lalu, tapi juga

bisa hadir dan berperan di masa kini hingga masa depan. Berikut penuturannya.

Pesantren dan pondoknja memberi pengadjaran lahir-batin bagi moerid-moeridnja. Pengadjaran dan pendidikan jang diberikan itoe joga jang didjalankan (di sekolah-sekolah modern), dipakai sehari-hari di dalam prijaji dan pegawai peroesahaan asing, akan tetapi ketjewanya, tidak pesantren itoe.

Karena pemoeda-pemoeda dari golongan apa sadja mempujai persatoean di dalam mentjari dan mendapatnja bekal goena hodoepnja, oleh karena itoe, sikap rohaninja anggota masjarakat kita pada masa poerbakala itu adalah tiada begitoe bertjerai berai. Sedang sang kiai sebagai goeroe dan pemegang obor jang menerangi doenia lahir dan gaib mempoenjai pengaroeh jang besar, agar soepaja masing-masing golongan anggota masjarakat kita dapatlah hidoep dengan tenteram dan damai...

Sekolah setjara Barat jang diberikan kepada kita dapat mentjoekoeopi kepandaian bagi mereka jang soeka bekerja sebagai member kesempatan goena mentjerdaskan (mengolah) sekalian tabiat jang berhoeboengan dengan boedi ataoe keperluan soekma, sedang keboedajaan kita tidak ataoe sedikit sekali diperhatikannja.

Karena itoelah, pemoeda-pemoeda hasil sekolahan ini kebanjakan mempujai sifat loba (*logstisch-materialistisch*), dan kegemarannja akan bekerdja merdeka kian lama kian berkoerang-koerang semangatnja...

Karena sang malaise ini dengan akibat penoetoepan beberapa matjam sekolahan bagi kita dengan menoerangkan pengaruh Barat, ada member kesempatan bagi kita goena mengatoer dan membentoeok oedjoed masjarakat kita jang sesoeai dengan tjita-tjita, kemaean dan kekoeatan kita... (Soetomo dalam Baso, 2012: 21-22).

Soetomo menampilkan secara kontras antara sistem pesantren pendidikan dan sistem pendidikan Barat di dalam penuturannya di atas. Setelah menimbang kelebihan dan kekurangan kedua sistem pendidikan tersebut, akhirnya Soetomo menjatuhkan pilihannya pada sistem pendidikan pesantren.

Sikap “curiga” terhadap pesantren pernah ditunjukkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana yang prokolonial. Takdir dengan sikap antipesantren dalam rangkaian *Polemik Kebudayaan* melontarkan kecaman pedas terhadap pesantren bahwa kembali ke pesantren berarti kembali kepada “antiintelektualisme, antiindividualisme, antiegoisme, antimaterialistik”. Kini ketika pesantren diangkat kembali di era modern, di era perdebatan ini, maka itu dilihat mewakili *traditie*. Itu artinya sama dengan jahiliah. “*Traditie* menjadi undang-undang besi yang tiada dapat dilanggar orang”, tandas Takdir seperti dikutip Baso (2012: 33).

Pada 1930-an terjadi perdebatan antara pihak yang pro dan kontra pesantren dalam media yang kemudian dikenal dengan *Polemik Kebudayaan*. Perdebatan tersebut menjadi menarik bukan dikarenakan dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda atau oleh orang-orang pesantren sendiri. Akan tetapi, perdebatan itu dilakukan oleh kalangan yang selama ini dekat dengan dunia media, dunia pembentuk opini. Orang-orang yang pro maupun kontra pesantren dalam media tersebut bukan orang yang baru muncul di dunia publik, bukan pula asing dengan dunia pesantren. Mereka sudah akrab dengan dunia santri, entah keakraban itu dari dekat, pergaulan dan interaksi yang intens dengan orang-orang pesantren, atau tahu dari koran dan berbagai sumber informasi lainnya. Mereka yang pro pesantren antara lain ialah dr. Soetomo, Ki Hadjar Dewantara, dr. Wahidin Soedirohoesodo, dan Sutopo Adiseputro. Sedangkan mereka yang kontra pesantren antara lain ialah Sutan Takdir Alisyahbana, Gunawan Mangunkusumo, dan Notosoeroto (Baso, 2012: 17-45).

Orang-orang pergerakan yang propesantren belajar dari pesantren tentang penolakan kerjasama dengan Belanda. Meskipun mereka ditumpas, aktivitas pergerakan tetap hidup di balik tembok-tembok pesantren. Pesantren menjadi oase perlindungan bagi aktor-aktor pergerakan yang dikejar-kejar oleh polisi Belanda. Sikap nonkooperatif dan radikal dari kiai-kiai pesantren beserta para santrinya terhadap pemerintah imperialis Belanda ini menimbulkan dua konsekuensi sekaligus, yakni merugikan dan menguntungkan pesantren sendiri. Berkenaan dengan hal ini Saifuddin Zuhri (2007: 130) menulis sebagai berikut.

Kadang-kadang sikap radikal ini membawa kerugian bagi dunia pesantren. Mereka tidak ikut “menikmati” kultur yang didatangkan kaum penjajah. Orang lain pandai berbahasa Belanda sedang sebagian besar kaum santri tidak. Orang bisa mengambil manfaat dari peradaban yang datang menyertai penjajahan, kaum santri apriori menolaknya. Berhubung dengan itu, banyak di kalangan bangsa kita sendiri yang mencemoohkan sikap pesantren ini. Padahal sikap yang diambil dunia pesantren mempunyai latar belakang untuk keselamatan kebudayaan santri kita, dan untuk membendung pengaruh kolonial Belanda yang tujuannya bukan saja mencapai keuntungan kulltur mereka, tetapi juga politik dan ekonomi mereka. Apa boleh buat, dunia pesantren menjadikan dirinya laksana lilin yang member terang alam sekeliling, walaupun dirinya sendiri hancur luluh menjadi korban.

Ali Maschan Moesa (2007: 113) dalam disertasi berjudul *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama* mengutip pernyataan Martin van Bruinessen menegaskan bahwa banyak pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai. Pada 1903, Kiai Kasan Mukmin Sidoarjo memaklumkan diri sebagai “Mahdi” dan memberitahu para pengikutnya bahwa dia bertugas mendirikan sebuah kerajaan di Jawa serta menyerukan mereka berjihad melawan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan para kiai merupakan bagian dari *nation-state* Indonesia yang lengkap dengan pengalaman kesejarahan bersama tumbuh dan berkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kemudian hari (Moesa, 2007: 93).

Pada abad ke-18, pesantren mengalami kemerosotan secara beruntun. Menurut H.J. de Graaf (1989: 34) hal itu disebabkan oleh penentangan para penguasa bumiputera sendiri terhadap kiai-kiai pesantren di satu pihak, dan kekhawatiran penguasa kolonial Belanda terhadap kiai-kiai pesantren di lain pihak. Kekhawatiran tersebut mendorong mereka membuat pemisahan-pemisahan terhadap kiai-kiai pesantren, bahkan berusaha menindas mereka. Salah satu contoh penentangan penguasa bumiputera terhadap kiai-kiai pesantren dapat disimak dari tragedi pembantaian massal terhadap 5.000 sampai 6.000 kiai dan keluarganya di alun-alun Plered Mataram yang dilakukan oleh Amangkurat I (1646-1677). Karena alasan politik yang tidak menguntungkan penguasa Amangkurat I, pembantaian massal terhadap kiai-kiai dan keluarganya itu “terpaksa” dilakukannya (Huda, 2007: 219).

Perkembangan pesantren pada masa pemerintah kolonial Belanda banyak didukung oleh pesantren kerajaan. Saat itu di berbagai daerah di Nusantara tumbuh kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Pasai, Kerajaan Islam Darussalam di Sumatera, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Islam Pajang, dan Kerajaan Islam Mataram di Jawa (Daulay, 2001: 21). Ketika Indonesia dijajah Belanda, kegiatan pendidikan pertama kali diselenggarakan oleh VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang dipusatkan di Indonesia bagian Timur dan Batavia (Jakarta). VOC pada dasarnya merupakan badan perdagangan milik orang Belanda yang beragama Protestan. VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah diperkenalkan oleh orang Portugis. Untuk keperluan inilah, VOC mendirikan sekolah-sekolah

(Djumhur dan Danasuparta, 176: 115). Pada 1632 telah ditemukan 16 sekolah di Ambon. Sementara itu, pada 1706 telah ada 3 sekolah di Jakarta. Tujuan utama pendidikannya di samping untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan, juga untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC.

Secara khusus kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan instrumen yang ampuh untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Benda (1985: 48) menyatakan, “Bilamana bertanding dengan daya tarik pendidikan Barat dan persekutuan kultural Barat, maka Islam hanyalah menjadi pihak yang kalah”. Pada 1890, C. Snouck Hurgronje (1857-1936) mencatat bahwa jumlah pendidikan pesantren bertambah, akan tetapi dua puluh tahun berikutnya disaksikan pendidikan Barat mulai meraih kemenangan dalam perlombaan melawan saingannya yang Islam. Tujuan dari semua upaya ini sesuai dengan filsafat kolonialisme Hurgronje ialah menjadikan Indonesia modern yang terbaratkan (*westernized Indonesia*), bukan Indonesia modern yang Islam.

IMPLIKASI POLITIK ETIS TERHADAP EKSISTENSI PESANTREN

Sejak Politik Etis (1900-1920) diberlakukan di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Barat melalui politik asosiasi kebudayaan. Bahkan timbul gagasan asimilasi yang bertujuan memberikan tanah jajahan struktur sosial dan politik yang sama dengan negeri Belanda. Snouck Hurgronje, penasehat Belanda mengenai urusan Islam di Indonesia, yang menyadari bahaya Pan-Islamisme, mendesak agar rakyat Indonesia dipengaruhi untuk menjauhi gagasan Pan-Islamisme dengan memberikan pendidikan Barat melalui asosiasi dengan Belanda.

Politik Etis yang digagas Van Deventer secara prinsipil menentang eksploitasi materialistis pada masa silam dan harus menggantikan sikap *laissez faire* liberalisme dengan mengadakan intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi. Politik ini menonjolkan kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang ditindas. Van Deventer menganjurkan program yang ambisius untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dia ingin

memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, menganjurkan transmigrasi dari pulau Jawa yang terlampau padat penduduknya. Akan tetapi semua usaha perbaikan itu akan sia-sia tanpa pendidikan massa. Politik Etis dalam pengertian yang murni sesungguhnya hanya dilaksanakan oleh segelintir manusia. Tidak lama kemudian pendirian berputar balik dan antusiasme penganut Politik Etis mulai dikendalikan oleh perusahaan Belanda yang sangat berkuasa dan dibatasi oleh perhitungan pembiayaan. Politik Etis menjadi alat dalam tangan perusahaan raksasa yang mendominasi pemerintah. Politik Etis menyajikan slogan yang indah untuk menutupi metode-metode eksploitasi modal raksasa. Perorangan mungkin bersikap etis terhadap bangsa Indonesia, akan tetapi perusahaan tidak didasarkan atas motif etis melainkan motif ekonomis. Akhirnya perkataan “etis” mengandung arti yang hambar di Indonesia dan menimbulkan cemoohan di kalangan orang Belanda. Kesejahteraan rakyat Indonesia tak kunjung tiba. Pendidikan yang bagus tetap terbatas pada golongan atas. Untuk rakyat banyak pendidikan dikendalikan agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana, hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik (Nasution, 2001: 17-19).

Melalui usaha pengembangan sekolah-sekolah, pemerintah kolonial Belanda menjalankan “politik asosiasi” sebagaimana dianjurkan oleh Snouck Hurgronje, antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia-Belanda agar supremasi Belanda atas bangsa pribumi tercerminkan (Tjandrasamita, 2009: 267). Sejak awal abad ke-20, pengembangan sekolah-sekolah pemerintah Belanda yang bersifat diskriminatif itu mengalami tantangan dengan berkembangnya sekolah-sekolah swasta yang oleh pihak pemerintah kolonial disebut “Wilde Scholen”. Tantangan-tantangan yang diberikan oleh penguasa-penguasa Belanda, antek-antek priyayinya, dan sekelompok intelektual Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, menurut Benda (1985: 123) memberi pertumbuhan dan konsolidasi peradaban pesantren di Indonesia.

Politik Etis pada dasarnya dimaksudkan untuk mempromosikan citi-cita Kristiani. Menurut Alwi Shihab (1998: 43-44) dalam disertasi berjudul *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Politik Etis merupakan kerangka kerja yang di atasnya konsolidasi agama Kristen di Indonesia dimapankan. Politik Etis benar-benar

mencerminkan peralihan penting dalam strategi pemerintah kolonial Belanda ke arah Kristenisasi Indonesia. Kebijakan ini pada kenyataannya menunjukkan bahwa netralitas dalam hal agama adalah ilusi belaka.

Sejak awal, pemerintah kolonial Belanda bersikap sangat curiga terhadap kaum Muslimin di Indonesia. Kekhawatiran mereka tentu bisa dipahami mengingat sejumlah pemberontakan pernah berlangsung di bawah bendera Islam. Sejak Perang Diponegoro (1825-1830) dan seterusnya, kebijakan-kebijakan Belanda yang lebih ketat terhadap komunitas Muslim diberlakukan. Pada 18 Oktober 1825 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan resolusi yang menyebutkan bahwa setiap jamaah haji harus mempunyai pas-jalan dengan membayar f110, sementara jamaah haji yang tidak memiliki pas-jalan akan dikenakan biaya f220. Bahkan pada 6 Juli 1859 (*Stadsblaad* 42), penguasa kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi Haji (Putuhena, 2007: 293).

Karena alasan politik pula, pemerintah kolonial Belanda memisahkan pendidikan Islam dari sistem pendidikan umum yang dikembangkan. Pemisahan sistem tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang anti-Islam (Steenbrink, 1986: 6). Sejak pemisahan tersebut, lembaga pendidikan Islam mengambil jalan sendiri lepas dari gubernemen, tetap berpegang pada tradisinya sendiri, meski pun tetap terbuka terhadap perubahan. Dengan demikian, sejak permulaan abad ke-20 pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terpisah dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Salah satu model pendidikan umat Islam tersebut berbentuk pesantren.

Berdirinya pesantren sesungguhnya merupakan respons umat Islam terhadap dominasi imperialis Belanda saat itu. Hal ini tidak berarti bahwa pesantren baru didirikan setelah imperialis Belanda berhasil melumpuhkan kekuasaan politik Islam di Indonesia (Suryanegara, 1996: 130). Akan tetapi, yang dimaksud di sini ialah pesantren yang dijadikan sebagai medan pembinaan umat Islam yang disiapkan untuk mengadakan perlawanan terhadap imperialis Belanda. Perkembangan pesantren selain mengajarkan pembaruan Islam juga mengakibatkan terwujudnya komunitas baru antara haji, ulama, santri, dan pedagang. Kelompok ini tidak hanya antiadat yang bertentangan dengan Islam, tetapi juga antiimperialis Belanda. Tentu

saja pertumbuhan pesantren ini tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah haji Indonesia. Meningkatnya jumlah jamaah haji ini dapat dilihat dari perkembangan pada 1860 hanya 2.000 orang, tetapi pada 1880 menjadi 10.000, dan pada 1926 menjadi 50.000 jamaah haji (Suryanegara, 1996: 130).

Kelanjutan dari pertumbuhan pesantren yang antiimperialis Belanda menurut Geertz (1971: 68) membangkitkan *Santri Insurrection* (Pemberontakan Santri). Pemberontakan santri yang terjadi dari 1820-1880 tercatat sebanyak empat kali. Berkaitan dengan hal ini Geertz (1971: 68) memaparkan sebagai berikut.

In West Sumatra in 1821-28, a band of pilgrim zealots, outraged by the heterodoxy of local customs and bent on the establishment of theocratic government, massacred the Inducized royal family and a large number of village officials and were only checked finally by a Dutch military invasion. In Central Java in 1826-30, a disappointed claimant to the Javanese throne proclaimed himself the Mahdi (that is, the Muslim Messiah) and launched a full-scale Holy War against the colonial government and its agents. In Northwest Java in the 1840s and 1880s, popular outburst incited by local ulamas wiped out nearly the whole of the resident European community and most of the important Javanese civil servants. In North Sumatra in 1873-1903, the Atjehnese, combining memories of a corsair past, a general contempt for foreigners of all varieties, and a conception of themselves as the keenest Muslims in Asia, embroiled the Dutch in battle for thirty years.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlawanan umat Islam Indonesia terhadap kolonial Belanda berawal dari pesantren-pesantren. Oleh karena itu, Belanda sangat ketat dalam mengawasi perkembangan pesantren-pesantren. Berbagai tindakan dilakukan oleh Belanda dari yang halus hingga yang brutal sekali pun. Bahkan pada tahun-tahun 1930-an, sekolah-sekolah rakyat dan pesantren menghadapi pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Pesantren dari dulu selalu menjadi obyek pengawasan kolonial Belanda. Pengekangan diberlakukan kepada guru-guru, kiai-kiai dan juga sekolah-sekolah yang dianggap liar.

Sikap imperialis Barat (Belanda) yang tidak apresiatif terhadap lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren tercermin dari para penulis Barat abad ke-19 dalam memberikan gambaran dan kesan tentang salah satu lembaga pendidikan yang agak “aneh”, dan khusus menekankan adanya perbedaan dengan sekolah-sekolah Barat.

Inspeksi Pendidikan Kolonial Belanda bahkan memandang pendidikan pesantren tidak begitu penting (Steenbrink, 1994: 9). Oleh karena itu, keadaan dan statistik pesantren selalu tidak lengkap dalam laporan pendidikan. Bahkan sesudah 1927, bentuk pendidikan semacam itu sama sekali tidak dimasukkan dalam laporan resmi pemerintah kolonial Belanda.

Kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah yang diskriminatif sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa kalangan bumiputra, terutama dari kalangan pendidikan agama. Akibatnya sebagaimana dicatat oleh Tjandrasasmita (2009: 268) muncul gerakan pendidikan dan sosial. Sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan Islam muncul. Sekolah-sekolah itu didirikan oleh para ulama, seperti Syekh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdullah Ahmad di Minangkabau. Sementara itu, di Jawa muncul juga sekolah-sekolah berbasis keagamaan Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU juga mengembangkan lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren dan madrasah.

Berdirinya lembaga pendidikan yang berlandaskan Islam itu, di satu sisi merupakan upaya mengantisipasi perkembangan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan di sisi lain sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan gerakan politik bangsa Indonesia. Para tokoh pendidikan Islam menyadari betapa pentingnya pendidikan (agama) untuk membina generasi muda. Mereka khawatir pengaruh ulama dan pemikiran Islam akan lenyap dari generasi muda dengan berdirinya sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda yang secara resmi mengambil sikap netral terhadap agama.

Meskipun pemerintah kolonial Belanda menyatakan netral terhadap agama, namun faktanya tidaklah demikian dengan diterbitkannya Ordonansi Guru (Stadsblaad 1905 No. 550) yang berisi kewajiban bagi setiap penyelenggaraan pendidikan Islam harus memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Setiap guru juga diwajibkan membuat daftar murid-murid lengkap dengan segala keterangan yang harus dikirimkan secara periodik kepada pejabat yang bersangkutan (Tjandrasasmita, 2009: 269).

Berkenaan dengan Ordonansi Guru itu, Deliar Noer (1996: 194) menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut. Dia menyatakan sebagai berikut.

Salah satu cara yang dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengawasi Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ialah peraturan yang dikeluarkan dalam tahun 1905 tentang pendidikan Islam. Peraturan tersebut mengharuskan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam. Izin ini mengemukakan secara terperinci sifat dari pendidikan itu. Tambahan lagi guru agama bersangkutan harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk tertentu yang harus dikirimkan secara periodik kepada kepala daerah bersangkutan. Bupati atau pejabat yang sama kedudukannya hendaklah mengawasi dan mengecek apakah guru agama tersebut bertindak sesuai dengan izin yang diberikan. Pejabat ini juga harus mengawasi anak-anak murid dimaksud yang berasal dari luar daerah guru tadi.

Ordonansi 1905 tersebut dinilai oleh umat Islam sebagai sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Peraturan ini memang mudah dijalankan oleh sekolah yang memiliki organisasi yang rapi, tetapi tidak demikian halnya dengan guru-guru agama Islam. Mereka tidak menyelenggarakan administrasi yang rapi dalam mengatur sekolah/pengajian. Bahkan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren tidak menyelenggarakan administrasi seperti itu, tidak mencatat nama seluruh santri atau guru-guru yang mengajar di sana.

Pengawasan yang amat ketat dan terus-menerus itu terhadap para guru agama Islam dianggap sebagai pembatasan kemerdekaan mereka. Hal ini terutama dikarenakan implementasi peraturan tersebut dipercayakan kepada para kepala bumiputera yang dengan alasannya sendiri mudah menolak pemberian izin yang diperlukan. Lebih tragis lagi peraturan itu juga membatasi materi yang diajarkan. Hal ini dinilai sebagai pengekanan tanpa batas yang jelas.

Anehnya, ketika peraturan ini dikeluarkan tidak menimbulkan protes dari pihak Islam sendiri di Jawa. Hal ini tidak dapat dipahami bahwa mereka menerima peraturan tersebut. Faktor-faktor tidak adanya protes ketika itu lebih dikarenakan oleh rendahnya kesadaran tentang dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut dan ketidaktahuan para guru agama dalam mengorganisir diri menghadapi kesewenang-wenangan Belanda ketika itu. Namun demikian, akhirnya pada Kongres Al-Islam 1922 sikap pemerintah kolonial

Belanda itu dipandang sebagai bentuk penghambatan terhadap aktivitas pendidikan Islam. Karena adanya protes dari kalangan umat Islam, pemerintah kolonial Belanda mencabut Ordonansi tersebut melalui Stadsblaad 1925 No. 219.

Benda (1985: 101) menjelaskan bahwa Ordonansi Guru 1925 membawa akibat terhadap kaum ortodoks maupun kaum reformis. Peraturan baru itu mewajibkan guru-guru pesantren maupun para muballigh Muhammadiyah untuk membuat laporan tentang tujuan memberikan pelajaran agama kepada orang-orang yang bukan keluarga dekatnya disertai dengan pernyataan tentang teks-teks yang dipakai dalam pelajaran tersebut. Peraturan ini diperluas bagi guru-guru agama di desa yang terlibat dalam mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam yang paling dasar kepada para pemuda.

Ordonansi baru itu pada dasarnya tidak berbeda dengan Ordonansi 1905. Perbedaannya hanya terletak pada masalah izin penyelenggaraan pendidikan Islam yang tidak lagi memerlukan izin bupati. Meskipun demikian, dalam Kongres Al-Islam 1926 diambil keputusan untuk menolak bentuk pengawasan pemerintah kolonial Belanda seperti itu dan menuntut agar pemerintah kolonial Belanda segera mencabutnya. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda tetap tidak mau mencabut Ordonansi dengan Stadsblaad 1925 itu. Bahkan, sebaliknya pada Januari 1927 peraturan yang semula hanya berlaku bagi Jawa, diberlakukan untuk Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok. Pada 1930-an diberlakukan juga di Bengkulu.

Pada 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan tentang pengawasan terhadap sekolah swasta (*Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs*) lewat Stadsblaad 1932 No. 494 yang lebih populer dengan ordonansi sekolah liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*). Peraturan itu menetapkan bahwa para guru yang akan mengajar di sekolah swasta yang bersubsidi maka harus meminta izin kepada pegawai distrik setempat. Pelamar harus alumni dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi dan tidak akan mengganggu ketenangan dan ketertiban pemerintah kolonial. Ordonansi ini juga dimaksudkan untuk mencegah pengaruh politik pada sekolah-sekolah swasta yang disebut “sekolah liar” (Putuhena, 2007: 270).

Labeling “sekolah liar” kepada pendidikan Islam khususnya menunjukkan bentuk arogansi dan penganaktirian pemerintah

kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Ordonansi Sekolah Liar tersebut membatasi bahkan mematikan sekolah-sekolah partikelir termasuk pesantren. Dampak dari perlakuan yang negatif dari pemerintah kolonial Belanda menyebabkan pendidikan Islam termasuk pesantren menghadapi kesulitan-kesulitan dan terisolasi dari arus moderniasi. Sebagai dampaknya menurut Tilaar (2000: 169) pendidikan Islam termasuk pesantren termarginalisasi. Meskipun keadaan tersebut tidak selamanya negatif, namun hal itu telah membawa pendidikan Islam cenderung kepada sifat tertutupan dan ortodoksi. Sikap yang sangat diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda membuat pendidikan Islam terdorong menjadi milik rakyat pinggiran/pedesaan. Pendidikan tersebut mempunyai konotasi pendidikan “kampungan” yang identik dengan keterbelakangan dan sangat ortodoks.

Kebijakan dan peraturan pemerintah kolonial Belanda di bidang pendidikan menjadi bagian integral dari politik yang dijalankan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dasar pemikirannya ialah ketakutan, panggilan “suci” agama Kristen dan paham kolonialisme penjajah (Rukiati dan Hikmawati, 2006: 57). Muara dari seluruh upaya pembatasan-pembatasan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dimaksudkan untuk “memberangus” sampai ke akar-akarnya kegiatan-kegiatan umat Islam Indonesia di bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang diletakkan sebagai bagian integral kebijakan Islam pemerintah kolonial Belanda dan dirancang untuk meningkatkan standar intelektual kaum pribumi sangat berpengaruh terhadap rakyat. Dengan mengesampingkan faktor-faktor lain, umat Islam bereaksi secara negatif terhadap penetrasi misi Kristen yang dibawa masuk melalui kerjasama antara pemerintah dan sekolah misi Kristen. Umat Islam benar-benar merasa khawatir karena perubahan ini dapat mengakibatkan merosotnya pengaruh nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang pendidikan di Indonesia direalisasikan dalam bentuk model persekolahan dengan tidak memasukkan pendidikan Islam, termasuk pesantren di dalam sistem pendidikannya. Model persekolahan ini dalam praktiknya menurut Fasli Jalal sebagaimana dikutip Usman Abu Bakar dan Surohim (2005: 70) berorientasi pada kelas sosial, bersifat elitis, dan diskriminatif, serta secara terselubung lebih berorientasi pada

kepentingan penguasa kolonial. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda bercorak ganda, yakni corak lama yang berpusat di pesantren dan corak baru yang berpusat di sekolah yang didirikan oleh Belanda. Dualisme dunia pendidikan ini tentu tidak menguntungkan perkembangan bangsa Indonesia, bahkan merugikan umat Islam itu sendiri.

Sistem pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda merupakan pendidikan liberal dan netral agama. Kenetralan kolonial Belanda terhadap agama tidak konsisten dikarenakan Belanda lebih melindungi Kristen daripada Islam. Kebijakan kolonial Belanda untuk bersikap netral kepada agama didasarkan pada dalih adanya evolusi yang meninggalkan agama. Karena Islam dianggap memiliki kekuatan politik yang membahayakan pihak kolonial, maka Islam senantiasa mengalami tekanan. Oleh karena itu, semangat politik umat Islam selalu ditekan dan diawasi. Sikap Belanda ini mengacu kepada analisis Snouck Hurgronje yang memilah Islam pada tiga kategori, yakni dalam arti ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kekuatan politik. Pada bidang ibadah dan sosial kemasyarakatan Belanda bersikap netral, sedangkan dalam bidang politik Belanda menekan.

Sejak Indonesia dijajah Belanda, pendidikan Islam memperoleh tantangan yang cukup berat. Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sekolah-sekolah model Belanda yang dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga rendah yang dapat “digaji” jauh lebih murah daripada pekerja golongan Belanda yang “diimpor” dari negeri Belanda. Hal ini dapat mengancam eksistensi pendidikan Islam termasuk pesantren yang lebih menekankan isi pendidikannya kepada pengembangan nilai-nilai moral keagamaan ketimbang menciptakan buruh-buruh murahan (Mansur dan Junaedi, 2005: 52). Demikianlah, faktor yang melatarbelakangi pendidikan formal yang berorientasi pada kerja dengan sifat-sifat kapitalisnya yang cinta pada harta (materialistik) sehingga mengalami berbagai malpraktik pendidikan yang dilakukan sekarang ini.

Pada 1932, pemerintah kolonial Belanda menetapkan sebuah ordonansi yang memberikan kewenangan membubarkan dan menutup madrasah/pesantren dan sekolah yang dianggap tidak memiliki izin penyelenggaraan. Ordonansi ini juga berhak menutup sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial Belanda. Ordonansi ini dikenal dengan *Wilde School Ordonnantie* (Peraturan Sekolah Liar).

Pemberlakuan peraturan yang amat tidak mendidik dari bangsa Belanda yang menganggap dirinya “terdidik” kepada rakyat Indonesia di atas berdampak negatif terhadap dunia pesantren. Banyak para kiai mengadakan “uzlah” (mengasingkan diri) ke desa-desa terpencil. Mereka memindahkan pesantren-pesantrennya ke tempat pemukimannya yang baru itu (Kafrawi, 1978: 34). Itulah sebabnya sampai sekarang, pesantren pada umumnya berada di desa-desa. Para kiai dan santri “mengisolir” diri, namun tetap dengan semangat antikolonialisme.

Laporan pemerintah Hindia Belanda pada 1885 mencatat perkembangan yang pesat jumlah lembaga pengajian dan pesantren di seluruh Jawa (kecuali Kesultanan Yogyakarta) mencapai 14.929 dengan santri sebanyak 222.663. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Shumubu pada 1942 mencatat jumlah pesantren serta madrasah sebanyak 1.871 dengan jumlah santri sebanyak 139.415. Kemungkinan penurunan jumlah pesantren dan madrasah tersebut merupakan dampak dari upaya pemerintah Hindia Belanda membatasi perkembangan jumlah pesantren dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar/menengah bagi murid-murid Indonesia (Dhofier, 2009: 62).

SIMPULAN

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi kalangan pesantren sebagaimana “difatwakan” oleh Snouck Hurgronje ialah memisahkan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah kolonial Belanda harus menghidupkan golongan pemangku adat. Golongan adat ini akan menentang kelompok Islam santri. Penentangan ini disebabkan lembaga adat dibentuk oleh tradisi lokal, sedangkan Islam bersifat universal. Kondisi ini memudahkan pemerintah kolonial menyempitkan ruang gerak Islam.

Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mendekati golongan priyayi. Hurgronje menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda bekerja sama dengan kebudayaan Indonesia-Belanda. Hal ini dapat dimulai dengan mempererat golongan priyayi yang menjabat pamongpraja. Untuk memperlancar usaha ini, pemerintah kolonial Belanda mendidik priyayi dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat yang diberikan kepada kalangan priyayi sebenarnya bukan untuk

memodernisasikan mereka ke arah berpikir bebas dan bercita-cita merdeka tetapi sekedar dijadikan alat untuk melindungi adat.

Untuk melemahkan kaum santri di Aceh, Belanda menjalankan politik yang sama seperti dijalankan di Jawa. Untuk melemahkan golongan santri di Jawa, Belanda mendekati golongan priyayi, sedangkan di Aceh mereka mendekati kaum hulubalang. Golongan hulubalang ini didekati dan diangkat menjadi *zelfbesturder* (yang memerintah sendiri).

Atas dasar pertimbangan kolonialisasi, misionarisasi Kristen, dan ketakutan terhadap Islam, maka pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan dunia pendidikan Islam Indonesia termasuk pesantren. Pada 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus bernama *Priesterraden* yang bertugas mengawasi kehidupan keberagamaan dan pendidikan Islam, khususnya pesantren. Badan inilah yang berhasil mempengaruhi pemerintah kolonial Belanda untuk mengeluarkan Ordonansi Guru 1905 dan Ordonansi Guru 1925.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Muarif. 2001. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Arifin, H.M.. t.t. *Kapita Selecta Pendidikan (Umum dan Agama)*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Bakar, H. Usman Abu dan Surohim. 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas)*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Baso, Ahmad. 2012. *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Dhofier, Zamakhsyari. 2009. *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Djumhur, I dan H. Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Geertz, Clifford. 1971. *Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Graaf, H.J. de. "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18" dalam Azyumardi Azra (penyunting dan penerjemah). 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nor. 2007. *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Kafrawi, H. 1978. *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Cemara Indah.
- Kamandoko, Gamal. 2008. *Boedi Oetomo Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Khuluq, Lathiful. 2001. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKiS.
- Madjid, Nurcholish. t.t. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mansur, dan Mahfud Junaedi. 2005. *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mochtar, H. Affandi. 2009. *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi: Pustaka Isfahan.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

- Prasodjo, Sudjoko, dkk. 1975. *Profil Pesantren Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*. Jakarta: LP3ES.
- Putuhena, M. Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Rukiati, Hj. Enung K. dan Fenti Hikmawati. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Steebrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. terjemahan Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Jakarta: LP3ES.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1996. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. terjemahan Butche B. Soendjojo. Jakarta: P3M.
- Zuhri, KH. Saifudin. 2001. *Guruku Orang-orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.